

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA LASI DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI NANGA TOÍ DI DESA
LASI KECAMATAN KILO
TAHUN 2023**



Oleh:

**IGA MAWARNI
2019B1B033**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

TAHUN 2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA LASI DALAM
MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PANTAI NANGA TOI DI DESA
LASI KECAMATAN KILO
TAHUN 2023**

Disusun dan diajukan oleh:

**IGA MAWARNI
2019B1B033**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Mataram, 17 Oktober 2023

Pembimbing I

Drs. H. Abdurahaman, M.M.
NIDN: 0804116101

Pembimbing II

M. Ulfatul Akbar Jafar. S.AP., M.IP
NIDN : 0809039203

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Administrasi Publik**



Rahmat Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN : 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA PANTAI NANGA TO'I DI DESA LASI KECEMATAN KILO KABUPATEN
DOMPU**

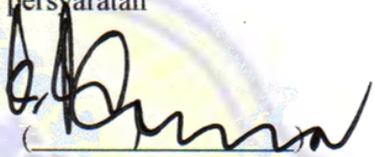
Di susun dan di ajukan Oleh:

IGA MAWARNI

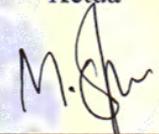
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 17 Oktober 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

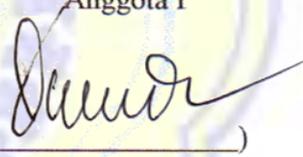
Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN.0804116101

()
Ketua

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.IP
NIDN.0809039203

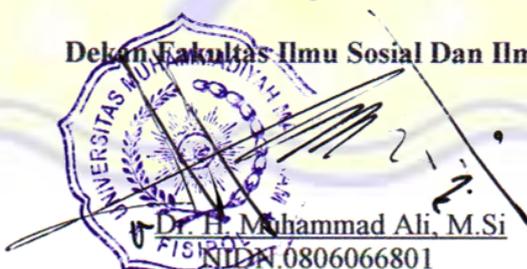
()
Anggota I

Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN.0830016101

()
Anggota II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

()
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 28 Februari 2024

Mahasiswa,



Iga Mawarni
2019B1B033



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iga Mawarni
NIM : 2019B1B033
Tempat/Tgl Lahir : Kilo, 23 Juni 2001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 081 340 925 136 / Iga8590@gmail.com
Email : Iga8590@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisis Kebijakan Pemerintah desa Lasi dalam pengembangan
Objek wisata Pantai Nanga To? di desa Lasi Kecamatan Kilo
Kabupaten Dompu

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 498

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 November 2023

Penulis



Iga mawarni
NIM. 2019B1B033

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iga mawarni
NIM : 2019B1B033
Tempat/Tgl Lahir : Kll, 23 Juni 2001
Program Studi : administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 390 92 136 / iga8540@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis kebijakan pemerintah desa lasi dalam pengembangan objek wisata pantai nanga Toi di desa lasi kecamatan bico kabupaten dompu.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

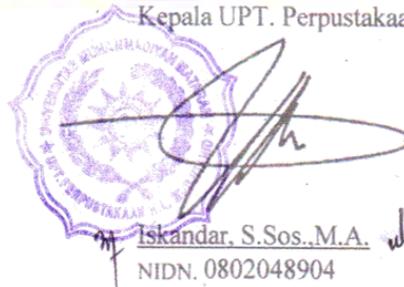
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 November 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iga mawarni
NIM. 2019B1B033



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

"Jangan biarkan rasa takutmu menentukan masa depanmu"



PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kakek dan nenek ku tercinta yang sangat mencintai saya dari kecil sampai sebesar ini, yang telah membesarkan saya dengan tulus dan sabar, yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan dan semangat untuk tetap melanjutkan jenjang pendidikan, dan yang telah memenuhi dan membiayai sekolah saya, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain kata terimakasih yang setulus-tulusnya. Jika saya menulis tentang kebaikan dan ketulusan akek dan nenek saya seribu kertas pun tidak akan pernah cukup!
2. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Irwan dan Asni yang sudah melahirkan saya dengan sepenuh hati, yang telah menyayangi dan mendoakan saya.
3. Terimakasih Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang selama ini telah sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan kepada saya.
4. Terimakasih Kepada Keluarga saya, paman, bibi dan adik-adik saya yang selalu mmeberikan sport serta dukungan terhadap saya.
5. Terimakasih kepada abng saya Faturrahman yang selalu memberikan dukungan dan membantu saya selama mengerjakan Proposal, Skripsi.
6. Terimakasih untuk orang-orang terdekatku, Trisna, Geng peta, reni, rena, putri, nurhidayah, abang anas, Ma'ruf, Ifan wahyudin, nurul yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
7. Kepada Teman-Teman seperjuangan yang selalu bersama-sama memberikan semangat dan dukungan untuk tetap maju dan berjuang sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Proposal yang berjudul “Implementasi program pemerintah desa lasi dalam mengembangkan objek wisata pantai nanga toí di Desa Lasi Kecamatan Kilo Tahun 2022” dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini pula, saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya teman-teman memberikan saran yang sangat berharga. Akhir kata, semoga segala upaya yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama di lokasi penelitian.

1. Bapak Drs. Abdul Wahab MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Drs.H.Abdurahman,M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar. S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing II

yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik

6. Orang Tua Saya Tercinta yang selalu memberikan saya Do'a, Dukungan, sekaligus penyemangat dan motivasi hidup, sehingga dalam penulisan proposal ini, bisa diselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman saya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, sehingga dalam penulisan proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Para Dosen yang tentunya tidak dapat satu-persatu penulis sebutkan yang membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Dalam penyusun proposal ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Mataram, 17 Oktober 2023
Penulis,

Iga Mawarni

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA LASI DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI NANGA TO'I DI DESA
LASI KECAMATAN KILO
TAHUN 2023**

ABSTRAK

Pariwisata Pantai Nanga To'i adalah pantai pasir putih yang terletak di Desa Lasi, Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu memainkan peran penting sebagai sumber penghidupan bagi penduduk di Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Pariwisata di Desa Lasi merupakan potensi sumber daya alam yang melimpah, lingkungan yang masih asri, serta keunikan alam dan budaya, dan pemandangan pantai yang sangat indah, air pantainya yang tenang membuat wisatawan yang ingin mandi merasa aman karena gelombangnya yang kecil dan airnya dangkal. Keunggulan-keunggulan inilah yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan potensi pariwisata di Desa Lasi sehingga tempat pariwisata ini memiliki nilai guna untuk pemerintah dan masyarakat Desa Lasi serta para wisatawan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pemerintah Desa lasi dalam mengembangkan objek wisata pantai Nanga To'i Desa Lasi Kecamatan Kilo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana peneliti menggambarkan sesuatu yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Pengembangan wisata Pantai Nanga To'i Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu sebagai sebuah desa wisata rintisan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Lasi serta Pokdarwis masih kurang optimal dikarenakan, Sumber daya kurang efektif dilihat dari aspek staf yang kurang memadai, aspek informasi yang belum tersampaikan dibuktikan adanya sebagian dari masyarakat luar wilayah Kecamatan Kilo yang belum tau mengenai wisata Pantai Nanga To'i Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, aspek wewenang yang baik dimana terdapat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, serta aspek fasilitas yang masih kurang.

Kata Kunci: Implementasi, Pemerintah Desa, Wisata Nanga To'i

**AN ANALYSIS OF LASI VILLAGE GOVERNMENT POLICIES IN
DEVELOPING NANGA TO'I BEACH TOURIST ATTRACTION IN LASI
VILLAGE, KILO SUB-DISTRICT
YEAR 2023**

ABSTRACT

Nanga To'i Beach Tourism is a white sand beach located in Lasi Village, Kilo Sub-district, Dompu Regency, which plays an essential role as a source of livelihood for residents in Lasi Village, Kilo Sub-district, Dompu Regency. Tourism in Lasi Village has the potential for abundant natural resources, a beautiful environment, natural and cultural uniqueness, and stunning beach scenery; calm beach water makes tourists want to be safe because the waves are small and shallow. The government and the community need to develop these advantages to increase the tourism potential in Lasi Village so that this tourism site has value for the government and the people of Lasi Village and tourists. This study aimed to determine the implementation of the Lasi Village government programme in developing the Nanga To'i beach tourist attraction in Lasi Village, Kilo District. The method used in this research is to employ descriptive qualitative methods, where researchers describe something that happens in the field. The results of this study show that the implementation of Nanga To'i Beach tourism development in Lasi Village, Kilo Subdistrict, Dompu Regency, as a pilot tourism village managed by the Lasi Village Government and Pokdarwis is still less than optimal due to ineffective resources seen by the aspect of inadequate staff, the aspect of information that has not been conveyed as evidenced by some people outside the Kilo District area who do not know about Nanga To'i Beach tourism in Lasi Village, Kilo Subdistrict, Dompu Regency, the aspect of good authority where there is community participation in the development of tourism villages, and the aspect of facilities that are still lacking.

Keywords: *Implementation, Village Government, Nanga To'i Tourism*

**MENGESAHKAN
GALINAN FOTO COPY SESUAPASLINYA
MATARAM**

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	ii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kajian Teori.....	14
2.2.1 Implementasi	14
2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan	17
2.2.3 Tahap – Tahap Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.4 Model Implementasi Kebijakan	20
2.3 Sektor Unggulan Desa.....	25

2.4 Pariwisata	26
2.4.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata	27
2.4.2 Pengembangan Objek Wisata.....	32
2.4.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana	34
2.6 Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian	38
3.3 Penentuan Informan atau Narasumber	39
3.4 Jenis Dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.2 Hasil Penelitian	47
4.2.1 Kegiatan Pengembangan SDM Objek Wisata Nanga To'i	47
4.2.2 Kegiatan Pengembangan Obyek Wisata	49
4.2.3 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	51
4.2.4 Faktor Penghambat pemerintah Desa dalam mengembangkan sektor wisata Pantai Nanga To'i.	56
4.3 Pembahasan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

LAMPIRAN.....
.....Err
or! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4. 1 Jumlah Pendidikan	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	37
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Desa Lasi	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata bagi suatu negara memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sektor pariwisata memiliki potensi untuk menghasilkan devisa yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.. Menurut pandangan Richard Sihite dalam (Cahyaningrum, 2021) disebutkan bahasanya pariwisata merupakan suatu bentuk perjalanan yang dilakukan oleh individu dalam periode waktu yang terbatas dan terencana dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan tamasya atau memenuhi keinginan-keinginan lainnya yang bersifat hiburan dan bukan untuk bekerja atau melakukan bisnis di tempat yang dikunjunginya.

Desa wisata merupakan entitas sosial yang terdiri dari komunitas yang mendiami suatu wilayah yang sama dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka bersama-sama mengelola tempat tinggal mereka menjadi sebuah kawasan yang memiliki potensi wisata, serta mengembangkannya dengan memanfaatkan potensi-potensi lain yang ada. Masyarakat yang tinggal di desa wisata memiliki peran sentral sebagai tuan rumah bagi para wisatawan, sehingga sikap dan perilaku mereka mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ramah dan penuh keramahan. Selain itu, masyarakat desa wisata dapat memfasilitasi kebutuhan wisatawan melalui penyediaan

akomodasi yang mendukung perkembangan sektor pariwisata, seperti *homestay*, cinderamata, dan layanan pemandu wisata, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan ekonomi ini diwujudkan melalui pemanfaatan sepenuhnya dari segala potensi yang dimiliki oleh desa wisata tersebut. (Cahyaningrum, 2021)

Sektor pariwisata memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan devisa yang signifikan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Pariwisata Pantai Nanga To'i, yang terletak di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, memiliki peran yang signifikan sebagai penyedia mata pencaharian bagi penduduk Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Pariwisata di Desa Lasi menawarkan potensi sumber daya alam yang melimpah, lingkungan yang masih alami, keunikan alam dan budaya, serta pemandangan pantai yang indah. Keistimewaan pantai ini, seperti pasir putih, air pantai yang tenang dan dangkal yang memberikan rasa aman bagi pengunjung yang ingin berenang, menjadi faktor yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan potensi pariwisata di Desa Lasi. Pengembangan pariwisata ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah, masyarakat Desa Lasi, dan para wisatawan. Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan pariwisata, diperlukan strategi, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. (Lestari, C.P, 2021:1).

Daya Tarik Wisata Nanga To'i, yang merupakan wisata bahari, menawarkan sejumlah fasilitas yang mendukung pengalaman wisata. Wisatawan dapat melakukan berbagai jenis aktivitas, seperti berenang dan berlayar dengan menggunakan perahu nelayan. Ketersediaan aktivitas-aktivitas ini menjadikan Daya Tarik Wisata Nanga To'i cukup populer di kalangan wisatawan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari pihak pengelola Pantai Nanga To'i, kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Nanga To'i mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Puncak kunjungan terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 1.473 wisatawan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 586 wisatawan pada tahun 2021 dan 332 wisatawan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata Nanga To'i, mencapai 795 wisatawan. Penurunan kunjungan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan pariwisata Nanga To'i.

Berdasarkan data kunjungan wisata Nanga To'i yang telah diperoleh, berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing perkembangan pariwisata di desa tersebut, sehingga menyebabkan wisata Nanga To'i tidak mampu bersaing secara regional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata dan belum

optimalnya pembangunan potensi pariwisata di kawasan wisata pantai Nanga To'i..

Kecamatan Kilo, yang telah ditetapkan sebagai kecamatan berbasis pariwisata, memiliki potensi wisata yang meliputi potensi wisata alam. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata yang melibatkan berbagai pihak. Tujuan dari melibatkan berbagai pihak ini adalah agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pendekatan ini sesuai dengan konsep Good Governance yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, evaluasi tetap diperlukan dalam implementasi kebijakan tersebut guna memastikan keberhasilan dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. (Sinaga, 2021)

Penerapan pengembangan pariwisata membutuhkan penyesuaian dengan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam pengembangan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan bahwa melalui implementasi kebijakan, akan mendukung aspek pemberdayaan masyarakat. Konsep *good Governance* atau tata kelola yang baik memberikan peluang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hal tersebut akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan lapangan kerja di wilayah tersebut. (Rusyidi & Fedryansah, dalam (Zulkarnaini, 2022).

Pengembangan industri pariwisata memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan wilayah di sekitar objek wisata, karena dapat berperan

sebagai sektor utama yang menjadi keunggulan dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini terwujud melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi dari pengunjung, dan partisipasi sektor swasta. Untuk menghindari keterbelakangan daerah, potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerah tersebut seharusnya menjadi batu loncatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang ada. (Purnadi, 2019:2).

Namun, pengembangan kawasan objek wisata di Desa Lasi belum mencapai tingkat maksimal, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti WC Umum dan Brugak sebagai tempat duduk santai bagi masyarakat sebagai pelaku pariwisata di Desa Lasi, Kecamatan Kilo. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pariwisata sangatlah penting, termasuk peningkatan kualitas jalan untuk akses ke lokasi wisata, ketersediaan tempat kuliner, tempat parkir, penginapan, dan sebagainya. Faktor-faktor ini merupakan pendukung penting dalam pengembangan pariwisata.

Selain berbagai kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya, daerah tujuan wisata juga perlu menyediakan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh wisatawan, seperti bank, apotek, rumah sakit, pom bensin, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana pariwisata, diperlukan koordinasi yang baik antara instansi terkait dan instansi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan dari instansi terkait dalam membangun

prasarana pariwisata sangat penting bagi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Koordinasi dalam tahap perencanaan yang diikuti oleh koordinasi dalam tahap pelaksanaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pariwisata. Wahyudin, (Dalam Purnadi, 2019:3).

Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, penting untuk membangun kerjasama yang sinergis dengan semua elemen terkait guna membangun wilayah dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan faktor penting dalam memajukan sektor pariwisata, karena mereka berperan sebagai penggerak dan pelaku dalam pengembangan pariwisata. Di Desa Lasi, SDM memiliki peran kunci dalam mencapai keberhasilan kinerja, dan anggaran juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, kendala lain dalam pengembangan pariwisata di Desa Lasi adalah kurangnya modal atau dana untuk mengelola tempat wisata. Oleh karena itu, pemerintah mencari investor untuk melakukan investasi di tempat wisata tersebut. (Lestari, C.P, 2021:4).

Peran Pemerintah Desa sangat krusial dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa Lasi, termasuk melakukan promosi melalui berbagai media mengenai keindahan tempat pariwisata yang tersedia di Desa Lasi. Upaya ini bertujuan agar objek wisata yang ada di sana dapat diketahui oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. (Lestari, C.P, 2021:4). Dalam UU Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan, pasal 30

yang berbunyi bahwa Pemerintah daerah/kota diberikan wewenang dalam menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota atau menetapkan destinasi pariwisata baru.

Pemerintah Desa memberikan penekanan terhadap 4 (empat) hal pokok dalam pembangunan kepariwisataan yang wajib dijadikan acuan yaitu: 1) Destinasi Pariwisata; 2) Pemasaran Pariwisata; 3) Industri Pariwisata, dan 4) Kelembagaan Pengelolaan Pariwisata. Berdasarkan ketentuan dan acuan tersebut Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yang merupakan salah satu Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi wilayah yang relatif menjanjikan bagi sektor kepariwisataan, bermaksud untuk memetakan potensi dan permasalahan di sektor kepariwisataan untuk kemudian diolah dan dianalisis menjadi rencana pembangunan kepariwisataan (Supriadi, & Roedjinandari, N. 2017).

Pada tahun 2022, upaya pengembangan wisata pantai Nanga To'i yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lasi sudah berjalan beberapa program yang dirancang dari tahun 2021 lalu, program tersebut merupakan suatu langkah untuk membangun beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pengembangan wisata pantai Nanga To'i tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu telah menjalankan beberapa program guna sebagai penunjang untuk kemajuan sektor wisata nanga to'i, beberapa program tersebut adalah dengan dibangunnya berbagai fasilitas atau sarana dan

prasarana seperti WC Umum, tempat parkir, tempat jualan, tempat pengambilan gambar (Foto) untuk digunakan para pengunjung wisata.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 10 lembaran daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 tentang Desa Wisata yang berbunyi a). bahwa potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat berada di Desa perlu membangun dan mengembangkan Desa Wisata. b). Bahwa sebuah Desa untuk dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi persyaratan dan belum ada peraturan yang mengatur, sehingga perlu menetapkan peraturan yang dijadikan dasar, pedoman dan mekanisme dalam penetapan Desa Wisata.

Hal ini merupakan wujud tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam upaya pembangunan atau pelaksanaan dari otonomi daerah yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah. (Hendrita, 2017). Pengembangan pariwisata secara umum merupakan implementasi pengembangan pariwisata yang memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi baik yang dilaksanakan secara nasional maupun daerah. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi: 1. Aspek Wisatawan; 2. Aspek Transportasi; 3. Aspek Promosi; 4. Aspek Atraksi Wisata; 5. Aspek Kuliner.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis berharap dapat membantu mengembangkan pemahaman mengenai judul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Nanga Toi Di Desa Lasi Kecamatan Kilo*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1.2.1 Bagimanakah program pemerintah Desa dalam mengembangkan sektor wisata pantai nanga toí di Desa Lasi Kecamatan Kilo?
- 1.2.2 Apakah faktor pendorong dan penghambat pemerintah Desa dalam mengembangkan sektor wisata pantai nanga toí di Desa Lasi Kecamatan Kilo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pemerintah Desa dalam mengembangkan sektor wisata pantai nanga toí di Desa Lasi Kecamatan Kilo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemerintah Desa dalam mengembangkan sektor wisata pantai nanga toí di Desa Lasi Kecamatan Kilo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu menjadi sumber pengetahuan di instansi pemerintahan yang berkaitan dengan implemtasi kebijakan, yang spesifiknya berfokus pada bidang pemerintahan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan sumber informasi untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya dalam konteks masalah penelitian ini. Hal ini juga menjadi wadah untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam konteks nyata.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat umum, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memajukan pariwisata lokal.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mengusulkan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pembangunan daerah .

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menjadi sumber referensi yang penting dalam kerangka penelitian. Referensi ini membantu peneliti dalam mengembangkan landasan teoritis untuk penelitian mereka. Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa jurnal yang relevan dengan topik yang sama dengan penelitian penulis. Beberapa jurnal ini kemudian digunakan sebagai referensi untuk memperkaya kerangka konseptual penelitian ini. Berikut adalah informasi mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis, mencakup nama peneliti, tujuan penelitian, dan metodologi yang diterapkan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Sugi rahayu, dkk (2015) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourisme) dikabupaten kulon progo daerah istimewa Yogyakarta	Penelitian kuantitatif deskriptif, teknik pengumpulan data adalah wawancara analisa data menggunakan model interaktif miles dan huberma	Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi pariwisata yang signifikan yang dapat dijadikan sebagai program Community-Based Tourism (CBT). Potensi tersebut meliputi wisata alam (back to nature) dan wisata religi.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Namun, persamaannya adalah keduanya berfokus pada topik implementasi dan pengembangan wisata.
2.	N.Erna Malia Susfenti,	Pengumpulan data dilakukan dengan cara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa	Perbedaan antara penelitian

	<p>Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (<i>community based tourism-cbt</i>) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita</p>	<p>study pustaka,wawancara serta observasi sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif</p>	<p>peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata masih mendominasi, meskipun seharusnya dalam pengelolaan perkotaan, pemerintah seharusnya hanya berperan sebagai fasilitator. Sebaliknya, pelaksanaan dan pengawasan seharusnya diserahkan kepada masyarakat. Penting untuk menerapkan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism - CBT) agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya desa wisata ini.</p>	<p>terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian, sementara persamaannya adalah keduanya fokus pada topik implementasi dan pengembangan wisata.</p>
3.	<p>Asworowati (2016) mengenai pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian, studi kasus di Bali, DIY, NTB dan Sumatera Utara</p>	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan cara Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran wisatawan dan pengeluaran daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan jumlah hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di daerah penelitian.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penggunaan metode penelitian yang berbeda, sementara persamaannya adalah keduanya membahas tentang implementasi dan pengembangan wisata.</p>
4.	<p>Abd Muis¹ e-Journal Administrasi Negara 2016 peran dinas pariwisata dalam</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan prosedur</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan: 1. Motivator dalam pengembangan pariwisata memiliki peran penting dalam</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada objek</p>

	meningkatkan kunjungan wisatawan (studi pengembangan ekowisata di Kabupaten Penajam Paser Utara)	pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek	<p>mendorong perkembangan usaha pariwisata. Pemerintah daerah berperan sebagai motivator untuk mendukung motivasi investornya, masyarakat, dan pengusaha di sektor pariwisata, sehingga perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.</p> <p>2. Fasilitator, dalam hal ini Dinas Pariwisata, bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang mendukung program-program yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengembangan potensi pariwisata.</p> <p>3. Dinamisator, pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengembangan pariwisata memiliki peran dalam mengintegrasikan ketiga pihak tersebut, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan demi perkembangan pariwisata yang lebih baik.</p>	penelitian, sedangkan persamaannya adalah keduanya berfokus pada topik implementasi dan pengembangan wisata.
5.	Ratih Melatiwi Purwaningsih Desember 2013, Pengaruh Kualitas	Metode penelitian yang digunakan adalah rasionalistik dengan analisis data kualitatif.	Kemampuan berbahasa verbal yang dimiliki oleh pemandu wisata mencakup kemampuan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian

<p>Pelayanan Pemandu Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Candi Prambanan Tinjauan Khusus pada Kemampuan berbahasa Verbal</p>		<p>monolog dan dialog dalam menyampaikan informasi kepada wisatawan. Ketika mendampingi wisatawan di suatu ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata), pemandu wisata harus mampu berbicara dalam bentuk monolog saat menjelaskan informasi. Pemandu wisata perlu menjadi pembicara yang kompeten agar wisatawan sebagai pendengar dapat memahami dan mengerti informasi yang disampaikan.</p>	<p>sekarang terletak pada objek penelitian, sementara persamaannya adalah keduanya membahas tentang implementasi dan pengembangan wisata.</p>
--	--	--	---

Sumber: Skripsi Tahun 2013-2016

Dari ke kelima penelitian terdahulu, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari penelitian tersebut, memiliki persamaan baik itu dari beberapa aspek masalah, dan beberapa aspek lainnya seperti, masalah konsep pengembangan (*community based touris-cbt*), infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, promosi (pemasaran), kurangnya partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat, kurangnya kemitraan, pelibatan sektor swasta, dan lemahnya peran pemerintah dalam menjadi fasilitator dalam pengembangan wisata.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Implementasi

Menurut Van Meter & Van Horn (1975), implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok lembaga pemerintah atau swasta. Tujuan dari tindakan-

tindakan ini adalah untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa kebijakan yang tidak segera diimplementasikan tidak akan memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Sebuah kebijakan yang hanya berupa proposal atau gagasan tanpa pelaksanaan akan menjadi arsip yang tidak memberikan manfaat nyata (Agustino. L. 2008).

Menurut Tachjan (2006:25), implementasi kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai proses administratif yang terjadi setelah kebijakan telah ditetapkan dan disetujui. Implementasi kebijakan terjadi di antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kegiatan administratif dilaksanakan untuk menerapkan kebijakan secara konkret dalam praktik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Wahab (2015), implementasi kebijakan mengacu pada pemahaman tentang apa yang terjadi setelah program kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah pada peristiwa atau kegiatan yang terjadi setelah panduan kebijakan negara disahkan, termasuk upaya administratif untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan dampak yang nyata terhadap masyarakat atau peristiwa yang terjadi.

Proses implementasi kebijakan melibatkan lebih dari sekadar perilaku badan administratif yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan memastikan kepatuhan kelompok sasaran. Ini juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi

perilaku semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pada akhirnya memengaruhi hasil yang diharapkan. Dalam implementasi kebijakan, faktor politik memainkan peran penting karena kebijakan dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada dalam sistem. Faktor ekonomi juga berperan karena kebijakan dapat memengaruhi distribusi sumber daya dan aktivitas ekonomi. Faktor sosial juga memiliki dampak karena kebijakan dapat memengaruhi masyarakat secara langsung, termasuk nilai-nilai, norma, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, implementasi kebijakan melibatkan dinamika kompleks antara aktor yang terlibat dan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang saling berinteraksi. Hal ini penting untuk dipahami agar dapat mengelola implementasi kebijakan dengan efektif dan mencapai dampak yang diharapkan. (*intended*) maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Edwards III (1980: 1), studi implementasi kebijakan memiliki signifikansi penting dalam bidang administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap di antara pembentukan kebijakan dan dampak kebijakan yang memengaruhi masyarakat yang terkena dampaknya. Teori yang diajukan oleh Edwards III dalam konteks implementasi kebijakan melibatkan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini memiliki keterkaitan dan harus berinteraksi secara saling memengaruhi. Studi implementasi kebijakan mengkaji peran komunikasi dalam menyampaikan informasi dan instruksi yang penting dalam

pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik secara finansial maupun sumber daya manusia, juga memegang peran vital dalam implementasi kebijakan. Sikap dan motivasi para pelaksana kebijakan, yang disebut sebagai disposisi, juga memengaruhi kesuksesan implementasi. Akhirnya, struktur birokrasi dalam organisasi pemerintah atau lembaga pelaksana memainkan peran dalam mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Semua variabel ini berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai implementasi kebijakan yang berhasil, diperlukan koordinasi yang efektif antara keempat variabel tersebut (Noviantama, 2017).

Berdasarkan paparan-paparan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang teramati setelah kebijakan telah diterbitkan secara resmi. Proses implementasi ini melibatkan usaha untuk mengelola berbagai masukan guna menghasilkan keluaran atau dampak bagi masyarakat berupa *output* atau *outcome*.

2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut (Tachjan: 2006) unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana

Unit-unit administratif atau unit-unit birokratis memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan kebijakan publik. Mereka merupakan bagian penting dari birokrasi pemerintah yang memiliki

peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam proses implementasi kebijakan, unit-unit ini memiliki kewenangan dan diskresi untuk memilih instrumen yang paling tepat untuk digunakan.

Sebagai hasil dari tahap awal kegiatan unit administratif, jika kita memandangnya sebagai suatu sistem, outputnya berupa kebijakan administratif. Kebijakan administratif ini mencakup kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang kemudian diimplementasikan melalui program-program operasional. Dengan demikian, terbentuklah struktur program sebagai hasil dari proses ini (Lemay, 2002:33).

2. Program

Kebijakan administratif yang pada awalnya bersifat umum harus diuraikan menjadi program-program operasional yang konkret dan dapat dijalankan. Pembuatan program-program ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan oleh para pelaksana. Program-program ini tidak hanya menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah, tetapi juga secara terperinci menjelaskan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, metode dan prosedur kerja yang harus diikuti, serta standar yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu, melalui struktur program tersebut, dapat dijelaskan secara komprehensif mengenai arah, strategi, dan sasaran yang dijalankan oleh setiap unit administratif dalam menangani

perkembangan masalah yang ada dan mencapai tujuan serta target yang ditetapkan. Dengan demikian, struktur program ini mencerminkan secara komprehensif bagaimana setiap unit administratif menghadapi permasalahan yang terus berkembang dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

3. Target group atau kelompok sasaran.

Kelompok sasaran (*Target Group*), yang merupakan sekelompok individu atau organisasi dalam masyarakat, menjadi penerima barang dan jasa atau terpengaruh perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan pola interaksi yang diatur oleh kebijakan tersebut. Tingkat kepatuhan dan adaptasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan sangat bergantung pada sejauh mana isi kebijakan (program) sesuai dengan harapan mereka. Selain itu, karakteristik kelompok sasaran, seperti jumlah anggota, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial-ekonomi, juga memengaruhi efektivitas implementasi. Faktor-faktor ini, sebagian besar, dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal, termasuk aspek geografis dan budaya dalam lingkungan tersebut.

Faktor komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kekurangan dalam proses komunikasi dapat menjadi kendala dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan negara. Oleh karena itu, penyampaian isi

kebijakan melalui proses komunikasi yang baik berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan isi kebijakan kepada kelompok sasaran memiliki peran yang sangat penting.

2.2.3 Tahap – Tahap Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik diharapkan dapat berjalan secara efektif, oleh karena itu, diperlukan tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Islamy dalam Widodo (2009), tahap implementasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu.:

- a. *self - executing*, Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merumuskan dan mengesahkan suatu kebijakan, kebijakan tersebut akan terimplementasikan secara otomatis, seperti pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. *non self-executing*, bahwa suatu kebijakan publik perlu direalisasikan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai..

2.2.4 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model yang diajukan oleh Edwar III. Dalam implementasi kebijakan, terdapat empat variabel yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling terkait dan harus berjalan secara sinergis. Menurut George C. Edward III, terdapat

faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi, antara lain:(Noviantama, 2017):

a) Komunikasi

Efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman individu yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, penting bahwa ukuran dan tujuan kebijakan disampaikan secara terbuka dan jelas kepada para pelaksana kebijakan. Konsistensi dan keseragaman dalam ukuran dasar dan tujuan juga harus ditegaskan agar para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang tepat.

Komunikasi dalam konteks organisasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian. Untuk memastikan implementasi yang efektif, para pelaksana kebijakan harus memahami dengan jeta kemampuan mereka dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Dalam pelaksanaan kebijakan, penting bagi semua personel, termasuk pemimpin, pelaksana, dan kelompok sasaran, untuk menerima dan memahami dengan jelas dan akurat maksud serta tujuan kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan tidak dipahami dengan baik, risiko kegagalan akan meningkat. Ketidapkahaman oleh pembuat kebijakan tentang spesifikasi kebijakan juga dapat mengarah pada ketidakjelasan dalam arah tindakan yang harus diambil. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif kepada para pelaksana sangat penting untuk kesuksesan pelaksanaan kebijakan.

Ada tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu :

- a. Transmisi, penyampaian komunikasi yang baik
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan jelas dan tidak membingungkan
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan secara konsisten untuk dijalankan.

b) Sumber Daya

Tidak ada lagi permasalahan terkait kejelasan, konsistensi, dan akurasi dalam pelaksanaan dan pengiriman informasi. Namun, jika personel yang bertanggung jawab untuk menjalankan program kebijakan kekurangan sumber daya, tugas mereka dapat terhambat. Sumber daya ini mencakup jumlah staf yang memadai, tingkat keahlian pelaksana, informasi yang relevan dan memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, serta pemenuhan sumber daya terkait dalam pelaksanaan program. Selain itu, keberadaan kewenangan yang memastikan bahwa program dapat diarahkan sesuai harapan, serta fasilitas pendukung seperti dana dan sarana prasarana, juga sangat penting untuk melaksanakan kegiatan program dengan baik.

Ketika sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, pelaksanaan program dapat terganggu karena kurangnya pengawasan yang optimal. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, penting untuk meningkatkan keterampilan

dan kemampuan mereka dalam menjalankan program. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja program. Implementasi kebijakan juga memerlukan kepatuhan dari organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, sumber daya lainnya juga penting, seperti kewenangan dalam menentukan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan, termasuk alokasi dana, perekrutan staf, dan pengangkatan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program, seperti kantor, peralatan, dan dana yang memadai, harus terpenuhi. Tanpa fasilitas ini, pelaksanaan program akan menjadi mustahil.

c) Disposisi

Sikap implementor adalah faktor penting yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika implementor setuju dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusiasme. Namun, jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi dapat menghadapi berbagai masalah. Terdapat tiga bentuk sikap atau respons implementor terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksana terhadap kebijakan, petunjuk atau arahan kepada pelaksana untuk merespons program dengan penerimaan atau penolakan, serta intensitas respons yang ditunjukkan.

Dukungan dari pimpinan memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dukungan pimpinan dapat diwujudkan dengan memberikan prioritas kepada kebijakan sebagai program utama, menempatkan pelaksana yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan dalam hal wilayah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi lainnya.

Hal-hal penting dalam variabel disposisi adalah:

- a. Kecenderungan atau Tendensi, keinginan, dan kesepakatan dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan
- b. Penunjukan birokrat, seleksi, dan penempatan personel pelaksana kebijakan harus dilakukan terhadap individu yang memiliki komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Insentif, sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana, dapat dilakukan dengan memanipulasi insentif, seperti memberikan tambahan keuntungan atau biaya tertentu, untuk mendorong para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dengan baik..

d) Struktur Birokrasi

Dalam membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang berulang dalam badan-badan eksekutif yang memiliki keterkaitan potensial maupun aktual dengan pelaksanaan kebijakan yang mereka emban.

Menurut George C. Edward III, terdapat dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yakni:

1. Standar Operating Procedures (SOP): SOP adalah serangkaian prosedur yang telah ditetapkan untuk menjalankan kegiatan rutin. SOP memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, pelaksana kebijakan memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan kegiatan mereka, sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi pelaksanaan.
2. Fragmentasi: Fragmentasi merujuk pada penyebaran tanggung jawab kegiatan di antara beberapa unit kerja. Hal ini dapat mengakibatkan rentang tugas dan tanggung jawab yang tersebar, sehingga jalur birokrasi menjadi panjang. Dampaknya adalah proses implementasi kebijakan dapat terhambat karena terlalu banyak saluran komunikasi dan koordinasi yang harus dilalui. Selain itu, struktur organisasi yang terlalu panjang juga dapat melemahkan pengawasan dan menyebabkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Red tape dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

2.3 Sektor Unggulan Desa

Sektor strategis adalah sektor yang dijamin memiliki potensi pertumbuhan yang lebih cepat daripada sektor lain di suatu wilayah. Hal ini

disebabkan oleh faktor pendukung seperti akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terintegrasi, dan kemajuan teknologi. Untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor strategis, penting untuk mengoptimalkan faktor-faktor pendukung tersebut (Rachbini, 2001).

Sektor strategis tidak hanya berhubungan dengan lokasi geografis, tetapi juga mencakup sektor yang berperan dalam berbagai saluran ekonomi dan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor strategis memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor lain, baik sebagai penyedia input maupun penerima output sebagai input dalam proses produksi (Widodo, 2006).

Sektor unggulan seringkali dibandingkan, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Di tingkat internasional, sebuah sektor dianggap unggulan jika dapat bersaing dengan sektor serupa di negara lain. Di tingkat nasional, suatu sektor dikategorikan sebagai sektor unggulan jika dapat bersaing dengan sektor serupa yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional maupun domestik. Keberhasilan suatu daerah dalam bersaing dengan daerah lain dalam sektor yang sama dapat menjadikan sektor tersebut sebagai sektor unggulan dan berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut (Suyanto, 2000:146).

2.4 Pariwisata

Menurut A.J. Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan sementara orang dalam jangka waktu pendek ke destinasi di luar

tempat tinggal dan tempat kerja mereka, serta melibatkan berbagai kegiatan selama tinggal di destinasi tersebut.

Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), pariwisata adalah perpindahan sementara orang ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat kerja mereka, yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Selama berada di destinasi, pariwisata melibatkan beragam kegiatan dan memerlukan penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para pelancong.

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Youti (1991:103), istilah "pariwisata" berasal dari dua kata, yaitu "Pari" yang dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap, dan "Wisata" yang dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian, yang dalam konteks ini memiliki sinonim dengan kata "*Travel*" atau "*travelling*" dalam bahasa Inggris.. Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah "pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan istilah "*tour*"

2.5 Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.

Menurut Yoeti wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawa melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti berikut:

- a). Fasilitas transportasi
- b). Fasilitas akomodasi
- c). Fasilitas Catering Service
- d). Obyek dan atraksiwisata
- e). Aktivitas rekreasi
- f). Fasilitas pembelian
- g). Tempat atau toko

Prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- a. Sarana Pokok Pariwisata adalah: Hotel, Villa, Restoran.
- b. Sarana Pelengkap Pariwisata adalah: wisata budaya dan wisata alam

- c. Sarana Penunjang Pariwisata seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

Dalam pengembangan pariwisata tentu harus diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Yoeti mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain:

1. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi airbersih.
3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain.
4. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
5. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pospos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objekwisata.
6. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor Pemanduwisata Pom bensin dan lain-lain.

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai

bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata.

Indonesia sedang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan membuka wisatawisata baru. Dengan adanya obyek wisata banyak mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu Ismayanti menjelaskan bahwa dibukanya obyek wisata juga banyak membuka peluang usaha ditempat wisata, antara lain berdagang souvenir, sewa tikar, jasa foto, transportasi dan lain-lain

2.6 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata

2.6.1 Pengembangan Kualitas SDM

Pengembangan SDM, menurut Chris Rowley & Keith Jackson (2012), adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi para pekerja melalui pelatihan, pembelajaran di dalam organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja kerja. Tantangan dalam membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif bukanlah tantangan jangka pendek, melainkan jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen harus melihat program pengembangan dan pelatihan sebagai program jangka panjang yang berkelanjutan, sejalan dengan tantangan ini. Falsafah dan paradigma pengembangan dan pelatihan perlu beradaptasi dengan tantangan jangka panjang dan strategis (Sastradipoera, 2006).

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Rivai, 2008) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan berperan dalam pelatihan dan pengembangan

- a) *Cost-effectiveness* (efektivitas biaya).
- b) Materi program yang dibutuhkan.
- c) Prinsip-prinsip pembelajaran.
- d) Ketepatan dan kesesuaian fasilitas.
- e) Kemampuan dan preferensi peserta pelatihan.

2. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menurut Veithzal Rivai (2008:229) tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah :

- a) Untuk meningkatkan kuantitas output
- b) Untuk meningkatkan kualitas output
- c) Untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan
- d) Untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan
- e) Untuk mencegah timbulnya antipati karyawan

Kegiatan pariwisata seringkali memanfaatkan potensi alam, sosial, dan budaya. Keindahan alam sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga merupakan sumber daya potensial untuk pariwisata. Berbagai bentuk seni budaya, seperti tarian adat, rumah adat, seni musik, dan makanan khas daerah, merupakan contoh budaya yang memiliki potensi untuk kegiatan wisata. Selain itu, bangunan bersejarah dan seni seperti candi dan benteng juga sering dimanfaatkan sebagai objek wisata.

Indonesia saat ini sedang mempromosikan kegiatan pariwisata dengan membuka obyek wisata baru. Dengan keberadaan berbagai obyek wisata ini, telah menarik perhatian wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan kunjungan ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Ismayanti, pembukaan obyek wisata juga membuka peluang usaha di sekitar tempat-tempat wisata, seperti penjualan souvenir, penyewaan tikar, jasa fotografi, transportasi, dan lain sebagainya.

2.6.2 Pengembangan Objek Wisata

Menurut Yoeti, pengembangan adalah suatu upaya atau metode untuk menggerakkan serta memajukan sesuatu yang telah ada. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan selalu dihitung dengan keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang cermat sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pengembangan adalah strategi yang diterapkan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik pariwisata sehingga jumlah wisatawan meningkat, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positifnya (Paturusi, Samsul A, 2001). Menurut Yoeti (2001 dalam (Suwarti, S., & Yuliamir, 2017), pengembangan pariwisata adalah upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan produk pariwisata atau menambah jenis produk pariwisata tersebut.

Menurut Suwarti dan Yuliamir (2017), dalam pengembangan pariwisata terdapat tiga unsur penting yang diperlukan, yaitu:

1. Manusia, sebagai subjek utama yang terlibat dalam melaksanakan berbagai kegiatan pariwisata.
2. Tempat, merupakan unsur fisik yang menjadi lingkungan atau wadah untuk berbagai kegiatan pariwisata.
3. Waktu, mengacu pada berapa lama jangka waktu yang diperlukan oleh seorang wisatawan dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut..

Menurut Yoeti, wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan sementara ke tempat atau daerah yang sama sekali asing baginya. Oleh karena itu, sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, penting untuk menyediakan prasarana dan sarana pariwisata sebagai berikut:

- a. Fasilitas transportasi
- b. Fasilitas akomodasi
- c. Fasilitas Catering Service
- d. Obyek dan atraksiwisata
- e. Aktivitas rekreasi
- f. Fasilitas pembelian
- g. Tempat atautook

2.6.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Prasarana wisata adalah elemen-elemen alam dan buatan manusia yang sangat penting bagi para wisatawan saat mereka mengunjungi daerah tujuan wisata. Ini meliputi fasilitas seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lainnya. Untuk memastikan bahwa objek-objek wisata di daerah tujuan siap untuk dikunjungi oleh para wisatawan, prasarana wisata ini harus dibangun sesuai dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (Arwandi, 2016).

Membangun prasarana wisata dengan memperhitungkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata dan secara otomatis meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Selain fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya, daerah tujuan wisata juga perlu menyediakan fasilitas lainnya seperti bank, rumah sakit, pom bensin, pusat perbelanjaan, dan sebagainya (Arwandi, 2016).

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana wisata, kerja sama yang kuat antara instansi terkait di berbagai tingkatan, bersama dengan instansi pariwisata, sangat penting. Dukungan dari instansi terkait dalam pembangunan prasarana pariwisata merupakan hal yang krusial untuk pengembangan pariwisata di daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan, yang dilakukan dengan baik, adalah kunci keberhasilan pembangunan pariwisata (Arwandi, 2016).

Dalam pembangunan prasarana pariwisata, peran pemerintah memiliki dominasi karena pemerintah dapat memperoleh manfaat ganda dari

pembangunan tersebut. Manfaat tersebut mencakup peningkatan arus informasi, aktivitas ekonomi, mobilitas manusia antar daerah, dan sebagainya, yang pada gilirannya membuka peluang untuk berusaha dan bekerja sama (Arwandi, 2016).

Sarana wisata merujuk pada fasilitas di daerah tujuan wisata yang penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama perjalanan mereka. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata atau objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, preferensi pasar juga dapat memengaruhi jenis sarana yang disediakan. Beberapa contoh sarana wisata yang perlu disediakan di daerah tujuan wisata termasuk hotel, agen perjalanan, sarana transportasi, restoran, rumah makan, dan fasilitas pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap, sehingga pengadaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan (Arwandi, 2016).

Prasarana dan sarana kepariwisataan yang perlu tersedia sebelum mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Prasarana (infrastruktur) merujuk pada semua fasilitas yang memfasilitasi kelancaran proses ekonomi. Dalam mengemban peran dan fungsi dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus mengambil berbagai tindakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata ini dapat dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- a. Sarana Pokok Pariwisata adalah: Hotel, Villa, Restoran.
- b. Sarana Pelengkap Pariwisata adalah: wisata budaya dan wisata alam

- c. Sarana Penunjang Pariwisata seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

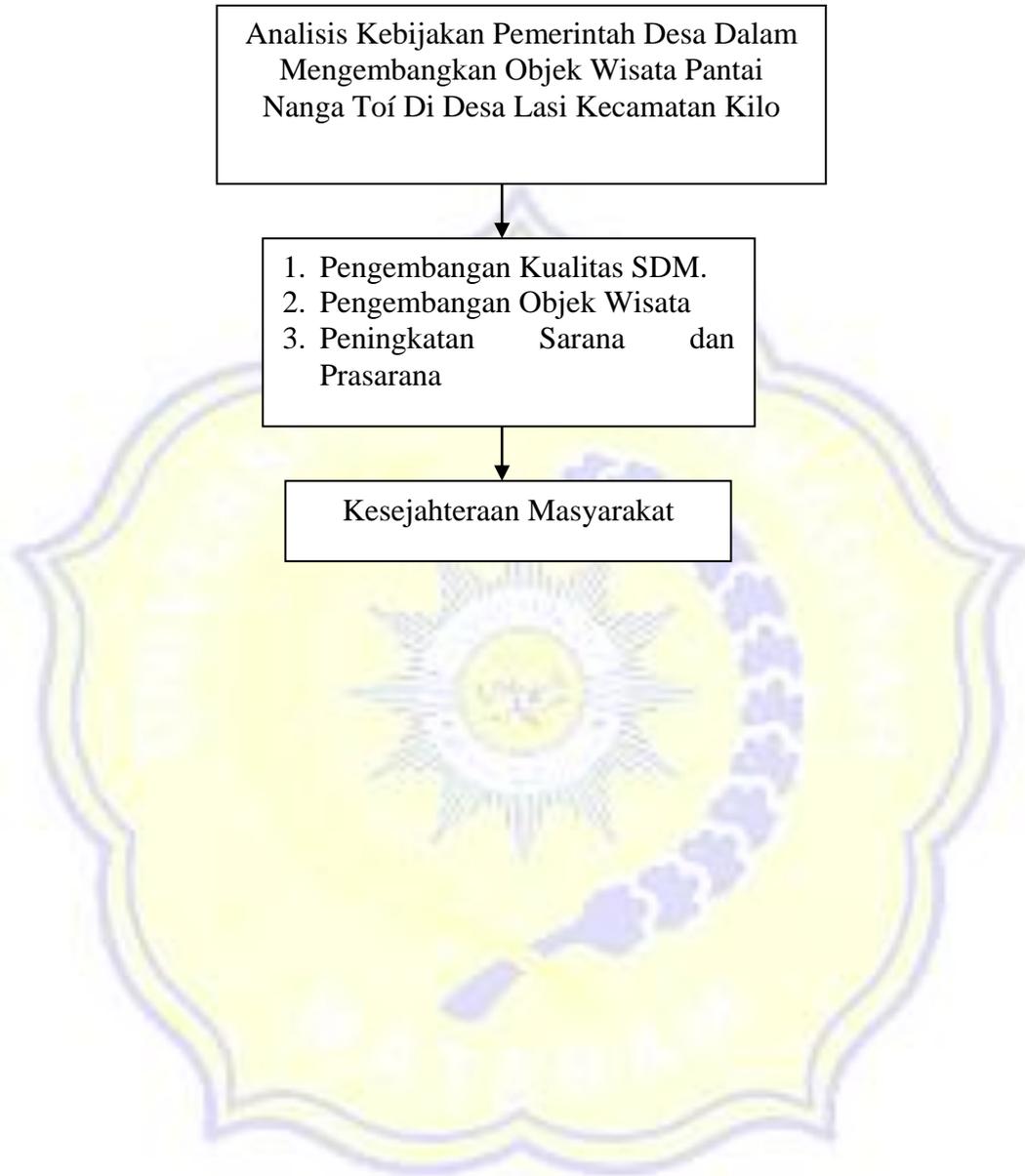
Dalam pengembangan pariwisata, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Yoeti mengungkapkan bahwa prasarana kepariwisataan meliputi semua fasilitas yang mendukung kelangsungan dan pertumbuhan sarana kepariwisataan, dengan tujuan memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan beragam wisatawan.

Prasarana tersebut termasuk:

- a) Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
- b) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi airbersih.
- c) Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain.
- d) Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
- e) Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pospos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objekwisata.
- f) Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor Pemanduwisata Pom bensin dan lain-lain.

2.7 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut definisi Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif ini berakar pada filsafat postpositivisme, di mana penelitian dilakukan dalam konteks objek yang alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui berbagai teknik, analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang telah terjadi. Ini mencakup perubahan dalam variabel-variabel yang ada, namun fokus pada deskripsi dan penjelasan tentang keadaan saat itu. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata Pantai Nanga Toí di Desa Lasi, Kecamatan Kilo.

3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Peneliti akan meneliti selama kurang lebih 1 bulan. Penelitian ini akan dilakukan di Wisata Pantai Nanga Toí Di Desa Lasi Kecamatan Kilo

Kabupaten Dompu. Supaya peneliti bisa mengumpulkan data dengan efektif dan efisien.

3.3 Penentuan Informan atau Narasumber

Subjek/Objek Penelitian Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informan-informan ini terdiri dari pemerintah desa dan penduduk asli di Wisata Pantai Nanga Toi di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut::

- 1) Kepala Desa
- 2) Kelompok sadar wisata (POKDARWIS)
- 3) Masyarakat
- 4) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Data tambahan seperti dokumen, foto, dan statistik juga dapat digunakan. Jenis data dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

- 1) Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber yang relevan dengan penelitian, seperti hasil wawancara yang

penulis lakukan, serta data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan yang dicatatkan tentang situasi dan peristiwa di lapangan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, majalah, dan foto yang relevan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkaya informasi yang diperoleh dari data primer, seperti wawancara dan observasi lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, peneliti menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan jenis penelitian. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis:

1. Observasi

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleng, 2013: 174) sebagai berikut:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan pengamat untuk melihat dan mencatat perilaku serta kejadian yang terjadi dalam situasi sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan pencatatan peristiwa yang terkait dengan pengetahuan proposisional atau pengetahuan yang diperoleh dari data langsung. Keempat, teknik pengamatan memungkinkan pemahaman situasi yang kompleks.

Kelima, dalam situasi tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak mungkin dilakukan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat berguna. Alat pengamatan dalam penelitian adalah *anecdotal record* (daftar riwayat kelakuan), catatan berkala, dan *check list*.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan dari melakukan wawancara, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2013: 186), termasuk:

1. Mengonstruksi pemahaman tentang orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan aspek lainnya.
2. Merekonstruksi pemahaman tersebut sebagaimana dialami pada masa lalu.
3. Memproyeksikan pemahaman tersebut untuk pengalaman di masa yang akan datang.
4. Memverifikasi, mengubah, dan memperoleh informasi yang diperoleh dari pihak lain.
5. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai bagian dari proses pengecekan.

Metode wawancara digunakan sebagai sumber data primer atau sumber data utama dalam penelitian ini. Data primer merujuk kepada data yang diperoleh langsung melalui penelitian dan wawancara dengan responden atau informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yang melibatkan penyusunan daftar pertanyaan sebelumnya. Alat-alat yang digunakan dalam wawancara ini mencakup buku, pena, dan perangkat perekam.

1. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam buku Moleong, 2013: 216), dokumentasi adalah catatan tertulis atau cetakan yang merekam kejadian masa lalu. Ini dapat mencakup catatan anekdot, surat, buku harian, surat keputusan, dokumen administrasi, arsip, dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Alat yang digunakan untuk dokumentasi dalam penelitian ini mencakup kamera, perangkat perekam, dan ponsel.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Jika jawaban tersebut belum memadai setelah analisis awal, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga mencapai tingkat kepuasan tertentu, sehingga data yang diperoleh dianggap

dapat dipercaya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246) menjelaskan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai, hingga data tersebut dianggap sudah memadai. Kegiatan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

